

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL
(PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011-2017)**

Yudha Eka Febrian

Kementrian Agrarian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Yudhafebrian74@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of the audit committee size, the independence of the audit committee, the number of financial experts in the audit committee, the number of audit committee meetings, the size of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners, the number of board of commissioner meetings and institutional ownership of disclosure of pharmaceutical companies' intellectual capital. The research population is pharmaceutical companies listed on the Stock Exchange for the period 2011-2017. The research sample consisted of 11 pharmaceutical companies with 7 years of observation. Sample data are 77 financial report data. The research method uses quantitative methods. The research design consisted of descriptive design and causal design. Data analysis using Multiple Linear Regression Analysis using SPSS Version 20. statistical program. Based on the results of data processing, it is known that the Adjusted R Square value is 0.462. This shows that variations in the Intellectual Capital Disclosure variable can be explained by 46.2% by Audit Committee Size variables, Audit Committee Independence, Number of Audit Committee Financial Experts, Number of Audit Committee Meetings, Board of Commissioners Size, Board of Commissioners Independence, Number of Board of Commissioners Meetings, Institutional ownership and company size as control variables while the remainder is explained by other variables not examined. The results of testing the hypothesis, it is known that the size of the audit committee, the independence of the audit committee, the number of audit committee financial experts, the size of the board of commissioners and the independence of the board of commissioners have a positive effect on disclosure of intellectual capital Audit committee meetings have no effect on disclosure of intellectual capital.

Keywords :*Intellectual Capital Disclosure, Audit Committee, Board of Commissioners, Institutional Ownership*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi serta ketatnya persaingan bisnis menyebabkan perusahaan merubah pola bisnis yang dilakukan dari yang semula menjalankan bisnis berbasis tenaga kerja (*labor-based business*) menuju bisnis berbasis pengetahuan (*knowledge based business*). Sawarjuwono & Kadir (2003) menyatakan dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset fisik lainnya memiliki peranan yang sama pentingnya dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Belkaoui (2003) menyatakan aset perusahaan, baik aset yang berwujud maupun aset tidak berwujud merupakan aset strategis yang sangat potensial bagi perusahaan. Aset intelektual dikategorikan sebagai aset strategis karena adanya hubungan erat antara modal intelektual dengan kinerja keuangan perusahaan. Alasan utama modal intelektual dianggap sebagai aset strategis dalam konteks kinerja organisasi, yaitu adanya perubahan tipe masyarakat dari masyarakat industrialis menuju masyarakat pengetahuan.

Kemunculan aliran baru dalam analisis keunggulan bersaing yang dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya (*Resource Based View of The Firm*), dimana sebuah perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dibanding kompetitor lain secara konsisten dengan mengandalkan berbagai macam sumberdaya, seperti aset berwujud maupun aset tak berwujud, kapabilitas, proses

organisasi, atribut perusahaan, pengetahuan, kebudayaan, dan apa saja yang berada dibawah kontrol perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strateginya dengan efisien dan efektif. Pandangan inilah yang dinilai relevan dalam mencerminkan keunggulan ekonomi berbasis pengetahuan (Marshall dalam Bontis, 2005). Salamudin, *et.al* (2010) menyatakan penekanan pada pentingnya nilai dan penyajian informasi aset tidak berwujud telah mengubah cara perusahaan dinilai. Pada akuntansi tradisional, perusahaan dinilai berdasarkan besarnya nilai aset berwujud. Namun, pada era ekonomi berbasis pengetahuan aset tak berwujud menjadi salah satu alat untuk menilai perusahaan dari pelaporan keuangan terkait dengan modal intelektual (*intellectual capital*). Macerinskiene dalam Utomo (2015) menyatakan ada tiga modal dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat mencapai tujuan, yaitu modal fisik (*physical capital*), modal keuangan (*financial capital*), dan modal intelektual (*intellectual capital*).

Modal intelektual (*intellectual capital*) dipandang memiliki peran yang penting dalam penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan (Ariyudha, 2010). Modal intelektual adalah sumber daya tak terwujud di dalam sebuah perusahaan yang mana berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Fitriani, 2012). Modal intelektual menjadi topik yang penting karena isu-isu mengenai pengungkapan modal intelektual diyakini berperan penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai keunggulan. Bontis (dalam Utomo, 2015) menyatakan modal intelektual sebagai segala sesuatu yang ada dalam perusahaan terkait sumberdaya tak berwujud, termasuk proses yang dilakukan perusahaan dalam mengolah sumber daya tersebut. Chen *et.al* (2005) menyatakan investor akan memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah. Modal intelektual tidak dapat diukur secara akurat karena merupakan aset yang tidak berwujud. Tidak ada pedoman atau peraturan tentang pengukuran spesifik dan pelaporan mengenai modal intelektual (Bruggen *at.al*, 2009). Walaupun begitu, pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan oleh perusahaan tetap dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan pengguna laporan tahunan perusahaan akan informasi perusahaan yang lengkap dan rinci. Meningkatkan relevansi laporan keuangan tahunan oleh perusahaan dengan melakukan pengungkapan modal intelektual.

Di Indonesia, pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan disajikan dalam laporan tahunan didukung regulasi, yaitu Bapepam Kep/134/BL/2006 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan. Akan tetapi, informasi mengenai item modal intelektual tidak diatur dalam regulasi tersebut. Dengan demikian pengungkapan informasi modal intelektual bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary*) meskipun pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar walaupun tidak diharuskan oleh PSAK (PSAK No.1 revisi 1998). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi permintaan yang diwajibkan. Ariyudha (2010) menyatakan pengungkapan modal intelektual merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Manajer diharapkan akan dapat mengungkapkan informasi modal intelektual untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan erat kaitannya dengan tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Selain itu, keberadaan dewan direksi pun dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat (Fitriani, 2012). Dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari atribut tata kelola perusahaan yang secara umum berperan penting dalam tatakelola perusahaan. Kepemilikan institusi dianggap turut serta dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang dapat mengendalikan kinerja manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pentingnya penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di Indonesia menarik untuk dilakukan, Pertama, perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan

terdaftar di BEI diwajibkan untuk mematuhi UU No. 40 tahun 2007 dan pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu dari jenis informasi yang dibutuhkan pemakai untuk mengetahui kondisi perusahaan dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Wiliam dalam Purnomisidhi, 2005). Dalam PSAK No. 19 (revisi 2012) menjelaskan bahwa aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun dalam regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan. Kedua, dapat mengurangi asimetri informasi dari tindakan manajer yang merugikan *stakeholder*. Pengungkapan informasi modal intelektual dapat memelihara hubungan dan kerjasama yang baik antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjaga kelangsungan operasional perusahaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian Haji (2015) dengan judul "*The Role of Audit Committee Attributes in Intellectual Capital Disclosure: Eviden from Malaysia*". Penelitian tersebut menguji pengaruh atribut komite audit yang meliputi ukuran komite audit, *independensi* komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite audit dan jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Alasan pemilihan penelitian Haji (2015) sebagai rujukan utama pada penelitian ini mengingat dalam penelitian tersebut memiliki penekanan yang spesifik terhadap efektivitas peran dari komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini menyadari peran komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan performa organisasi yang berlaku di Negara yang ekonominya berkembang (Haji, 2015). Fungsi komite audit berperan untuk meyakinkan bahwa semua informasi yang relevan telah tersampaikan dengan baik kepada pihak luar perusahaan sehingga dapat membuat peningkatan mutu pada proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi (Rainsbury, *et.al*, 2008).

Kemudian peneliti mengembangkan penelitian Haji (2015) dengan cara menambahkan variabel lain yang juga dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada suatu perusahaan yang bersumber dari penelitian Ishak (2018) dengan judul "*Monitoring Mechanism and Intellectual Capital Disclosure Among Bank in the GCC*". Peneliti menambahkan variabel ukuran dewan komisaris, *independensi* dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan kepemilikan institusi yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Haji (2015). Hal ini menyadari bahwa keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dan kepemilikan saham oleh institusi dapat meningkatkan proses pengawasan dan meningkatkan kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan, khususnya terkait publikasi modal intelektual perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor determinan atau faktor yang dapat mempengaruhi variabel pengungkapan modal intelektual meliputi komite audit, dewan komisaris dan kepemilikan institusi.

Objek dalam penelitian adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017. Alasan pemilihan perusahaan farmasi sebagai objek kajian mengingat bahwasanya perusahaan farmasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang saat ini sedang dihadapkan tantangan kompetisi global dan ketatnya kompetisi bisnis di sektor farmasi. Hal tersebut bermula dari rencana pemerintah yang akan meningkatkan penetrasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 100% bagi seluruh penduduk Indonesia pada 2019 mendatang (www.industry.co.id, 2018). Kebijakan tersebut dinilai akan mendorong peningkatan permintaan pasar terhadap obat generik tak bermerek. Pada program JKN, resep obat bagi peserta JKN didominasi obat generik tanpa merek dibandingkan dengan obat paten. Kondisi tersebut tidak menguntungkan Perusahaan Farmasi karena margin obat generik relatif lebih rendah dibandingkan obat-obatan jenis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut mendorong setiap perusahaan, tidak terkecuali perusahaan farmasi untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dan inovasi-inovasi dalam memproduksi produk obat-obatan yang bermutu meski dengan harga yang lebih kompetitif agar dapat bersaing dan mempertahankan eksistensi perusahaan, dimana peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Selain itu, perusahaan farmasi merupakan industri yang sangat memanfaatkan modal intelektual dalam kegiatan operasionalnya. Industri farmasi merupakan industri yang intensif melakukan inovasi dan seimbang dalam penggunaan sumber daya manusia serta teknologi sehingga pengungkapan modal intelektual menjadi suatu keharusan. Selain itu, perusahaan farmasi memiliki persaingan bisnis yang kuat, misalnya adanya berbagai obat generik, obat cina, obat luar yang beredar di masyarakat, mengharuskan perusahaan melakukan inovasi-inovasi demi menjaga stabilitas

operasional perusahaan farmasi. Hal tersebut sangat bergantung pada eksistensi aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan yang memperkuat dilakukannya pengungkapan modal intelektual guna memenuhi kebutuhan *stakeholder* guna mengambil kebijakan perusahaan maupun investor potensial dalam rangka keputusan investasi.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Marshall (dalam Bontis, 2005) menyatakan pentingnya posisi pengetahuan dalam era perekonomian global, dimana pengetahuan adalah mesin produksi yang kuat dan diperhitungkan keberadaannya. Perusahaan merubah pola bisnis yang dilakukan dari yang semula menjalankan bisnis berbasis tenaga kerja (*labor-based business*) menuju bisnis berbasis pengetahuan (*knowledge based business*). Sawarjuwono & Kadir (2003) menyatakan dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset fisik lainnya memiliki peranan sama pentingnya dengan modal berbasis pengetahuan dan teknologi. Wacana kompetisi dan keunggulan bersaing mengalami pergeseran yang signifikan dalam perkembangan strategi bisnis dan pembangunan ekonomi. Mulanya dikenal teori keunggulan absolut dimana sebuah organisasi atau negara memiliki keunggulan yang mutlak dari organisasi lain apabila organisasi tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh organisasi lain secara efisien. Kemudian muncul pemikiran baru oleh Michael Porter tentang keunggulan bersaing, dimana keunggulan suatu perusahaan diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya yang memiliki kinerja lebih tinggi dibanding perusahaan pesaing lainnya. Namun, pandangan Porter kemudian dianggap kurang mampu menjelaskan secara mendalam mengenai keunggulan suatu organisasi dibanding organisasi lainnya.

Kemunculan aliran baru dalam analisis keunggulan bersaing yang dikenal dengan pendekatan berbasis sumber daya (*Resource Based View of The Firm*), dimana sebuah perusahaan dapat mempertahankan keunggulannya dibanding kompetitor lain secara konsisten dengan mengandalkan berbagai macam sumberdaya, seperti aset berwujud maupun aset tak berwujud, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, pengetahuan, kebudayaan, dan apa saja yang berada dibawah kontrol perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan strateginya dengan efisien dan efektif. Pandangan terakhir inilah yang dinilai relevan dalam mencerminkan keunggulan ekonomi berbasis pengetahuan (Marshall dalam Bontis, 2005). Belkaoui (2003) menyatakan aset perusahaan, baik aset yang berwujud maupun aset tidak berwujud merupakan aset strategis yang sangat potensial bagi perusahaan. Aset intelektual dikategorikan sebagai aset strategis karena adanya hubungan erat antara modal intelektual dengan kinerja keuangan perusahaan. Alasan utama modal intelektual dianggap sebagai aset strategis dalam konteks kinerja atau kemajuan suatu organisasi, yaitu adanya perubahan tipe masyarakat dari masyarakat industrialis dimana masyarakat dikuasai oleh penggunaan teknologi sehingga memungkinkan adanya produksi massal dengan populasi masyarakat yang banyak dan pembagian jam kerja yang padat menuju masyarakat pengetahuan, yaitu masyarakat yang paham teknologi, memiliki pola pikir kritis serta cerdas dalam mengambil keputusan (Dracker, 2001).

Penekanan pada pentingnya nilai dan penyajian informasi aset tidak berwujud telah mengubah cara perusahaan dinilai (Salamudin, *et.al*, 2010). Pada akuntansi tradisional, perusahaan dinilai berdasarkan besarnya nilai aset berwujud. Namun, pada era ekonomi berbasis pengetahuan aset tak berwujud dapat menjadi salah satu alat untuk mengukur menilai suatu perusahaan dari pelaporan keuangan yang terkait dengan modal intelektual (*intellectual capital*). Utomo (2015) menyatakan ada tiga modal dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu modal fisik (*physical capital*), modal keuangan (*financial capital*), dan modal intelektual (*intellectual capital*). Modal intelektual (*intellectual capital*) dipandang memiliki peran yang penting dalam penciptaan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan (Ariyudha, 2010). Modal intelektual adalah sumber daya tak terwujud di dalam sebuah perusahaan yang mana berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Fitriani, 2012). Modal intelektual menjadi topik yang penting karena isu mengenai pengungkapan modal intelektual diyakini berperan penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai keunggulan. Bontis (dalam Utomo, 2015) menyatakan

modal intelektual sebagai segala sesuatu yang ada dalam perusahaan terkait sumberdaya tak berwujud, termasuk proses dalam memanfaatkan sumber daya.

Chen *et.al* (2005) menyatakan investor akan memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang rendah. Modal intelektual tidak dapat diukur secara akurat karena merupakan aset yang tidak berwujud. Tidak ada pedoman atau peraturan tentang pengukuran spesifik dan pelaporan mengenai modal intelektual (Bruggen *at.al*, 2009). Walaupun begitu, pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan oleh perusahaan tetap dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan pengguna laporan tahunan perusahaan akan informasi perusahaan yang lengkap dan rinci. Meningkatkan relevansi laporan keuangan tahunan oleh perusahaan melalui pengungkapan modal intelektual.

Di Indonesia, pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan disajikan dalam laporan tahunan didukung regulasi, yaitu Bapepam Kep/134/BL/2006 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan. Akan tetapi, informasi mengenai item modal intelektual tidak diatur dalam regulasi tersebut. Dengan demikian pengungkapan informasi modal intelektual bersifat pengungkapan sukarela (*voluntary*) meskipun pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar walaupun tidak diharuskan oleh PSAK (PSAK No.1 revisi 1998).

Ariyudha (2010) menyatakan pengungkapan modal intelektual merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan *stakeholder*. Manajer diharapkan akan dapat mengungkapkan informasi modal intelektual untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih baik mengenai posisi keuangan perusahaan dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan erat kaitannya dengan tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Selain itu, keberadaan dewan direksi pun dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat (Fitriani, 2012). Dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari atribut tata kelola perusahaan yang secara umum berperan penting dalam tatakelola perusahaan. Kepemilikan institusi dianggap turut serta dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual (Ishak, 2018). Kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang dapat mengendalikan kinerja manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang jelas dan sebenarnya mengenai kondisi perusahaan dan perusahaan telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan memahami masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Maka dari itu keberadaan komite audit sangat berpengaruh terhadap perusahaan (Haji, 2015).

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota Komite Audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite Audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak (Abawayya, 2010). Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 juga menyatakan perusahaan *go public* wajib untuk memiliki Komite Audit dengan jumlah minimal tiga orang, yaitu minimal satu orang komisaris *independen* yang juga berperan sebagai ketua komite audit, dan minimal dua orang pihak *independen* dari luar emiten. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen. Perusahaan dengan komite audit yang lebih besar cenderung mengungkapkan atau menyediakan banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian dari Ishak (2018), Wahyuni (2016) dan Haji (2015), menyatakan ukuran komite audit

berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan pada penelitian Mahadewi (2013) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis pertama (H₁) sebagai berikut :

H₁ : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Komite audit yang efektif dapat membuat peningkatan pada proses pelaporan sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder* (Rainsbury, *et.al*, 2008). Sebagian besar anggota komite audit independen memastikan efektivitas pengambilan keputusan manajemen strategis. Komite audit harus terdiri proporsi yang lebih tinggi dari direktur non-eksekutif. Komite audit *independen* menyediakan pemantauan yang lebih baik dari manajemen dari keberadaan anggota eksekutif dengan keputusan yang obyektif. Kehadiran direktur non-eksekutif di komite audit mengurangi kemungkinan masalah keuangan. Oleh karena itu, kehadirandirektur independen melindungi kepentingan pemegang saham.

Komite audit *independen* melindungi reputasinya dengan memastikan kualitas tinggi dari laporan keuangan. *Independensi* dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam pelaporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena anggota yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak dalam menangani suatu permasalahan. *Independensi* komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Komite audit yang efektif sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder* melalui pengungkapan modal intelektual (Rainsbury, *et.al*, 2008)

Pada penelitian dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan *independensi* komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Tidak ditemukannya riset gap mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kedua (H₂) sebagai berikut :

H₂ : *Independensi* komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Tingkat pendidikan seorang komite audit diwajibkan mampu memberikan integritas yang tinggi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya yang dapat meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Tingkat pendidikan komite audit dirasakan berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual karena semakin tinggi jenjang pendidikan anggota komite audit naja semakin baik pola pikir dan tindakan yang diambil oleh anggota komite audit, khususnya dalam pengawasan dan penilaian yang handal atas laporan keuangan tahunan perusahaan.

Financial literacy komite atau keahlian keuangan komite audit terdiri dari anggota yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan mendasar dan untuk mengevaluasi atau menganalisis informasi keuangan. Keahlian dalam audit, akuntansi dan pengendalian internal, merupakan faktor penting dari efektivitas komite audit. Anggota komite audit harus berpengetahuan dan berpengalaman baik untuk memenuhi tanggung jawab mereka secara efektif dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas komite audit. Kehadiran ahli keuangan membantu komite audit untuk memenuhi efisien mereka dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian internal, audit eksternal internal. Selain itu, pengalaman yang berbeda dari anggota komite audit membantu untuk mengevaluasi efektivitas komite Audit. Dengan demikian, komite audit dengan anggota yang pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola masalah keuangan bisa mengurangi perusahaan yang menghadapi *financial distress*. Dari perspektif audit internal, kehadiran ahli keuangan dari komite audit mengurangi kemungkinan kelemahan pengendalian internal. Ahli keuangan di komite audit dapat meningkatkan efektivitasnya, oleh karena itu untuk memenuhi tanggung jawab dalam pengawasan keuangan. Sesuai Peraturan No. IX.1.5 dikatakan bahwa setidaknya komite audit memiliki satu anggota yang mempunyai pengetahuan di bidang keuangan dan akuntansi. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki pendidikan dengan latar belakang akuntansi atau keuangan dianggap profesional melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap.

Pada penelitian dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan pada penelitian Mahadewi (2013) menyatakan bahwa jumlah ahli keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis ketiga (H_3) sebagai berikut :

H_3 : Jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit paling sedikit mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (Corporate Governance Guidelines, 2007). Dalam Audit Committee Charter (2005) dinyatakan bahwa semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Pertemuan komite audit yang lebih sering akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengatur pengungkapan modal intelektual. Pertemuan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite audit. Komite audit juga mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris manajemen senior, kepala auditor internal, dan kepala auditor eksternal. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit.

Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). Komite audit melakukan pertemuan tiga sampai empat kali dalam setahun, yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit, sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina, 2000). Berdasarkan Peraturan No. IX.1.5 disebutkan bahwa pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit perusahaan dalam satu tahun periode sekurang-kurangnya berjumlah 3 kali pertemuan. Variabel jumlah pertemuan anggota komite audit dinyatakan dengan lambang MAC.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian dari Ishak (2018), Indah (2017) dan Haji (2015) menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Mahadewi (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis keempat (H_4) sebagai berikut :

H_4 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat (Fitriani, 2012). Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Fungsi *service* menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasihat manajemen (direksi).

Collier dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan juga akan semakin efektif sehingga akan meminimalisasi *agency cost*. Pengendalian dan monitoring dewan komisaris dilakukan melalui komite-komite yang membantunya mengawasi secara langsung aktivitas perusahaan. Dikaitkan dengan pengungkapan mengenai nilai perusahaan (*Intellectual Capital/IC*), tekanan dewan komisaris yang berukuran besar terhadap manajemen akan semakin meningkat untuk mengungkapkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian dari Ishak (2018), Wahyuni (2016), menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Aini (2017), Mahadewi (2013) dan Arifah (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kelima (H_5) sebagai berikut :

H_5 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam teori agensi dikemukakan bahwa asimetri informasi terjadi karena perilaku oportunistik pihak manajemen. *Independensi* dewan diperlukan untuk memantau dan mengontrol perilaku oportunistik dari manajemen. Mekanisme corporate governance dapat diperkuat dengan keberadaan dewan komisaris independen. Di Indonesia, setiap perusahaan tercatat wajib melaporkan jumlah dan data dewan komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh dewan (Kep305/BEJ/07-2004).

Independensi dewan komisaris yang diproksi dengan proporsi komisaris independen yang meningkat maka fungsi kontrol akan semakin meningkat pula, sehingga membuat kontrol atas pengelolaan yang lebih efektif, dan menekan *agency cost* yang dikeluarkan oleh principal. Fama dan Jensen (1983) dalam Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa dewan yang mempunyai proporsi komisaris independen yang tinggi akan memiliki kontrol kuat atas keputusan manajerial, karena komisaris independen memiliki insentif untuk melakukan pengendalian atas keputusan mereka guna tetap mempertahankan citra yang baik bagi sumber modal dari luar perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian komisaris independen adalah meminta pengungkapan mengenai *Intellectual Capital* yang mencukupi dari pihak manajemen, sehingga perusahaan dapat tetap mempertahankan citranya di mata calon investor.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian dari Ishak (2018) menyatakan *independensi* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan pada penelitian Indah (2017) dan Arifah (2015) menyatakan *independensi* dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis keenam (H_6) sebagai berikut :

H_6 : *Independensi* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Haji, 2015). Hal ini akan meningkatkan kapasitas pemantauan dan diharapkan meningkatkan pengungkapan informasi modal kapital. Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi (FCGI, 2002). Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai

pengawas manajemen yang membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan.

Pertemuan dewan komisaris merupakan sarana komunikasi antar dewan komisaris maupun antara dewan komisaris dan manajer. Rapat dewan komisaris yang semakin sering dilakukan menandakan bahwa pengawasan terhadap manajemen tinggi, hal ini karena di dalam pertemuan dewan komisaris selalu membahas kinerja manajer selaku manajemen dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan manajemen yang tinggi ini diharapkan akan dapat mengurangi konflik agensi sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kinerja perusahaan kearah yang lebih baik. Rapat dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan dalam perusahaan selama satu tahun. Informasi mengenai rapat dewan komisaris dapat dilihat pada *annual report* perusahaan dalam bagian laporan *corporate governance*. Xie et al. (2003) dalam Waryanto (2010) yang menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan semakin efektif sehingga pengungkapan yang dilakukan perusahaan semakin luas.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian dari Ishak (2018) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Indah (2017) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Adapun penelitian Mahadewi (2013) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis ketujuh (H₇) sebagai berikut :

H₇ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

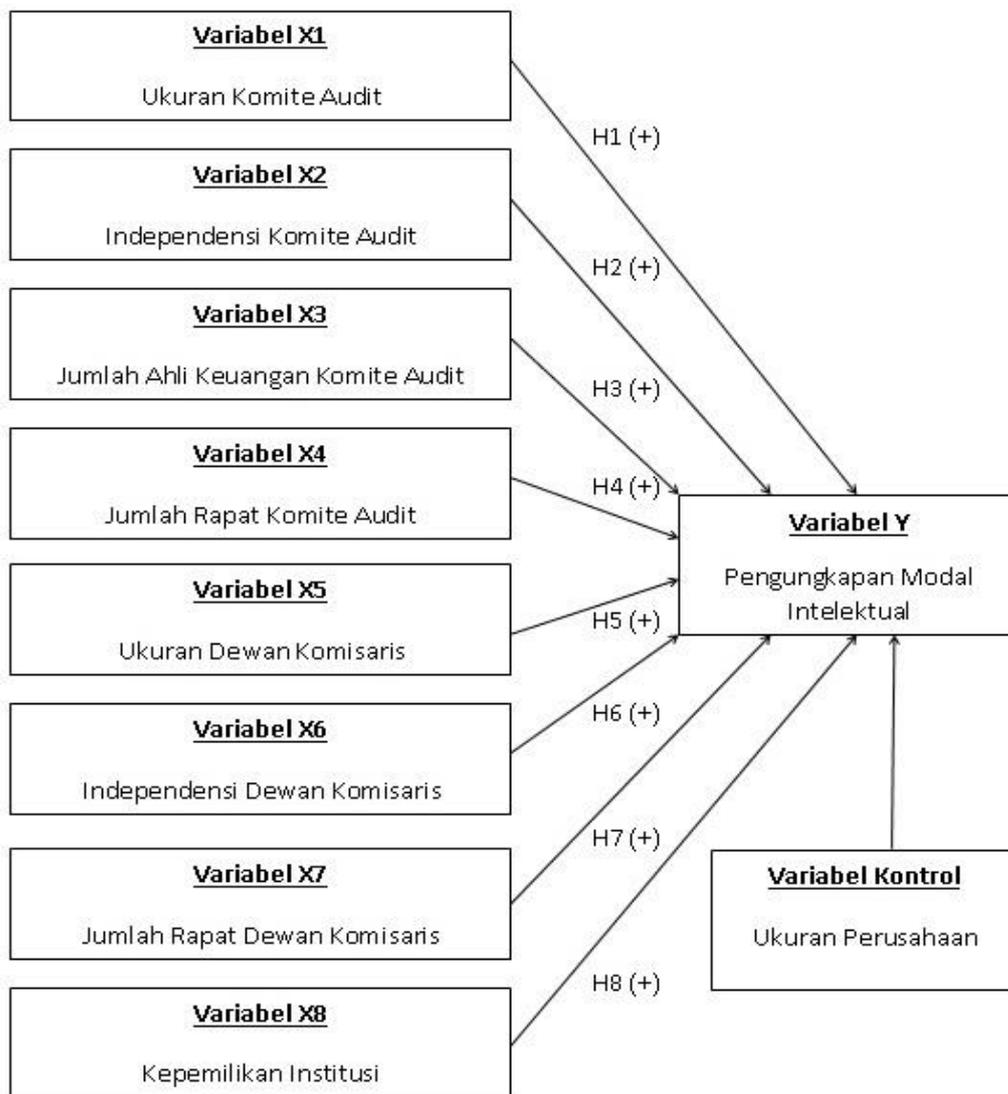
Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya (Sartika, 2015). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor yang berasal dari institusi dianggap mampu mejadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan (Aina, 2015). Institusi yang dimaksud adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lainnya yang bentuknya seperti perusahaan, kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemelik institusi dan *blockholdes* pada akhir tahun (Sartika, 2015). Sedangkan yang dimaksud dengan *blockholder* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholder* dengan kepemilikan saham diatas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham dibawah 5%. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan, yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas di dalam perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual ditemukan perbedaan hasil penelitian atau ditemukannya riset gap. Pada penelitian Ishak (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Indah (2017), Wahyuni (2016) dan Nurziah (2014) menyatakan kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya riset gap tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis kedelapan (H₈) sebagai berikut :

H₈ : Kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual

Kemudian untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, peneliti menyusun model penelitian yang disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber : Ishak (2018), Haji (2015) dan Peneliti lainnya

Model penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian Haji (2015) dan Ishak (2018) dan peneliti lainnya, dimana variabel pengungkapan modal intelektual pada perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017 diduga dipengaruhi ukuran komite audit, *independensi* komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, *independensi* dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan kepemilikan institusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Hypotesis Testing*, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel tetap (*Dependen*) dengan Variabel bebas (*Independen*). Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan telaahan statistika yang tepat untuk tujuan sebab akibat atau pengaruh (kausalitas) dengan menggunakan program statistik SPSS versi 20 yang ditujukan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan menjelaskan pengaruh ukuran komite audit, *independensi* komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, *independensi* dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusi terhadap pengungkapan modal intelektual.

Populasi penelitian adalah Perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2017 sebanyak 11 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan kepada pertimbangan subjektif peneliti. Pertimbangan tersebut adalah sampel penelitian dapat memberikan data atau informasi yang relevan dengan fenomena atau variabel dalam penelitian ini. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi sampel penelitian dengan kriteria, yaitu (1) Perusahaan farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2017, (2) Melakukan perdagangan saham aktif di BEI periode 2011-2017, dan (3) Memberikan laporan keuangan tahunan periode 2011-2017. Data sampel penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan farmasi yang telah diaudit dengan jumlah sebanyak 77 data laporan keuangan.

Variabel operasional dimaknai sebagai variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti dalam setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pengungkapan Modal Intelektual (Variabel Y)	Pengungkapan segala sesuatu yang dalam perusahaan terkait sumberdaya tak berwujud, termasuk proses yang dilakukan perusahaan dalam mengolah sumber daya Sumber : Bontis dalam Utomo (2012)	$ICDI = \frac{\text{Jumlah Item Yang Diungkapkan}}{\text{Total Item Pengungkapan Modal Intelektual}}$ Sumber : Li <i>et.al</i> (2008)	Rasio
Ukuran Komite Audit (Variabel X ₁)	Jumlah anggota komite audit di perusahaan. Sesuai peraturan no IX.1.5 disebutkan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 anggota Sumber : Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004	$ISAC = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}{3}$ Sumber : Pike (2005)	Rasio
<i>Independensi</i> Komite Audit (Variabel X ₂)	Jumlah anggota komite audit yang <i>independen</i> terhadap jumlah seluruh anggota komite audit Sumber : Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004	$ACINDP = \frac{\text{Jml anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$ Sumber : Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004	Rasio
Jumlah ahli keuangan Komite Audit (Variabel X ₃)	Anggota yang mampu membaca dan memahami laporan keuangan mendasar untuk mengevaluasi atau menganalisis informasi keuangan Sumber : Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004	$FEAC = \frac{\text{Jml anggota kom. audit ahli keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$ Sumber : Peraturan No. IX.1.5	Rasio
Jumlah Rapat Komite Audit (Variabel X ₄)	Pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit perusahaan dalam satu tahun periode sekurang-kurangnya berjumlah 3 kali pertemuan Sumber : Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.29/PM/2004	$MAC = \frac{\text{Jumlah Rapat Komite Audit}}{3}$ Sumber : Peraturan No. IX.1.5	Rasio

**ANALYSIS OF INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE FACTORS IN PHARMACEUTICAL COMPANIES
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE
2011-2017**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Ukuran Dewan Komisaris (Variabel X ₅)	Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan Sumber : Thesarani (2016)	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Sumber : Thesarani (2016)	Rasio
Independensi Komisaris (Variabel X ₆)	Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen Sumber : Kep305/BEJ/07-2004	$IDK = \frac{\text{JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN}}{\text{JUMLAH SELURUH DEWAN KOMISARIS}}$ Sumber : Kep305/BEJ/07-2004	Rasio
Jumlah Rapat Dewan Komisaris (Variabel X ₇)	Pertemuan atau rapat anggota dewan komisaris perusahaan Sumber : FCGI (2000)	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Dalam Satu Tahun Sumber : Waryanto (2010)	Rasio
Kepemilikan Institusi (Variabel X ₈)	Persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham beredar Sumber : Sartika (2015)	$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$ Sumber : Sartika (2015)	Rasio
Ukuran Perusahaan (Variabel Control)	Skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya total <i>asset</i> perusahaan Sumber : Damayanti dan sudarma (2007)	LN (Total Asset)	Rasio

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder

Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2013:426). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi nilai koefisien regresi variabel dalam model penelitian, yakni pengungkapan modal intelektual (variabel Y), ukuran komite audit, *independensi* komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, *independensi* dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, kepemilikan institusi (variabel X) dan ukuran perusahaan (variabel *control*), dimana nilai koefisien regresi variabel tersebut menjadi dasar disusunnya persamaan matematis model penelitian. Selain itu, analisis regresi linear juga digunakan untuk mengetahui nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi dari setiap variabel penelitian sebagai dasar dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian.

Persamaan matematis model regresi linear pada model 1 diuraikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$ICDI = \alpha + \beta_1 \text{Uk.KA} + \beta_2 \text{ID.KA} + \beta_3 \text{Ak.KA} + \beta_4 \text{Rpt.KA} + \beta_5 \text{Uk.DK} + \beta_6 \text{Id.DK} + \beta_7 \text{Rpt.DK} + \beta_8 \text{Kep.Inst} + \beta_9 \text{Size} + e$$

Dimana :

ICDI = Pengungkapan Modal Intelektual

α = Konstanta

$\beta_{1,2}$	= Koefisien Regresi Variabel
Uk.KA	= Ukuran Komite Audit
Id.KA	= <i>Independensi</i> Komite Audit
Ak.KA	= Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit
Rpt.KA	= Jumlah Rapat Komite Audit
Uk.DK	= Ukuran Dewan Komisaris
Id.DK	= <i>Independensi</i> Dewan Komisaris
Rpt.DK	= Jumlah Rapat Dewan Komisaris
Kep.Inst	= Kepemilikan Institusi
Size	= Ukuran Perusahaan
e	= <i>Standart error</i> (5%)

Pengujian hipotesis menggunakan uji t (uji parsial). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap dan mengetahui apakah variabel moderator dapat memoderasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel tetap. Hipotesis penelitian yang akan diuji dengan menggunakan uji t (uji parsial) terdiri dari hipotesis pertama (H_1), hipotesis kedua (H_2), hipotesis ketiga (H_3), hipotesis keempat (H_4), hipotesis kelima (H_5), hipotesis keenam (H_6), hipotesis ketujuh (H_7) dan hipotesis kedelapan (H_8).

Pengambilan keputusan pengujian hipotesis didasarkan kepada kriteria sebagai berikut :

Jika $Sig \geq \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap.

Jika $Sig \leq \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif pada penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian yang terkumpul pada tiap variabel. Penyajian data deskriptif dapat berupa tabel, grafik, perhitungan frekwensi, prosentase, *modus*, *median*, *mean* dan lain sebagainya (Sugiyono, 2013:206). Hasil statistik deskriptif variabel dalam model penelitian disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Modal Intelektual (Y)	77	2,04	4,56	3,0865	0,54120
Ukuran KA (X1)	77	1,00	2,00	1,3988	0,33467
<i>Independensi</i> KA (X2)	77	33,33	66,67	51,1697	12,68067
Jml. Ahli Keuangan KA (X3)	77	16,67	66,67	35,1730	16,13859
Jml. Rapat KA (X4)	77	1,00	1,67	1,3365	0,22077
Ukuran DK (X5)	77	6	12	8,66	1,759
<i>Independensi</i> DK (X6)	77	33,33	66,67	48,5209	10,13466
Jml. Rapat DK (X7)	77	3	6	4,09	0,710
Kep. Institusi (X8)	77	10,17	54,06	19,9422	12,22092
Ukuran Perusahaan (VC)	77	8,53	20,27	13,7594	2,80344
Valid N (listwise)	77				

Sumber : Output SPSS versi 20, 2019

Berdasarkan tabel 2, diketahui Pengungkapan Modal Intelektual pada 11 perusahaan farmasi selama kurun waktu 7 tahun terakhir memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 3,08% dengan penyebaran berkisar 0,54%. Nilai Pengungkapan Modal Intelektual minimum ditempati oleh PT. Tempo Scan Pacific Tbk sebesar 2,04% pada tahun 2017 sedangkan nilai maksimum sebesar 4,56% ditempati oleh PT. Indofarma, Tbk pada tahun 2013.

Ukuran Komite Audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 1,39% dengan penyebaran berkisar 0,33%. Nilai Ukuran Komite Audit minimum ditempati oleh PT. Merck, Tbk sebesar 1 pada tahun 2011 sedangkan nilai maksimum sebesar 2 ditempati oleh PT. Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2015.

Independensi Komite Audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 51,16% dengan penyebaran berkisar 12,68%. Nilai *Independensi* Komite Audit minimum ditempati oleh PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk sebesar 33,33% pada tahun 2016 sedangkan nilai maksimum sebesar 66,67% ditempati oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk pada tahun 2015.

Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 35,17% dengan penyebaran berkisar 16,13%. Nilai Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit minimum ditempati oleh PT. Kimia Farma, Tbk sebesar 16,67% pada tahun 2012 sedangkan nilai maksimum sebesar 66,67% ditempati oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk pada tahun 2014.

Jumlah Rapat Komite Audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 1,33% dengan penyebaran berkisar 0,22%. Nilai Jumlah Rapat Komite Audit minimum ditempati oleh PT. Pyridam Farma, Tbk sebesar 1 pada tahun 2014 sedangkan nilai maksimum sebesar 1,67 ditempati oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk pada tahun 2016.

Ukuran Dewan Komisaris memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 8,66% dengan penyebaran berkisar 1,75%. Nilai Ukuran Dewan Komisaris minimum ditempati oleh PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia, Tbk sebanyak 6 orang pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum sebanyak 12 orang ditempati oleh PT. Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2012.

Independensi Dewan Komisaris memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 48,52% dengan penyebaran berkisar 10,13%. Nilai *Independensi* Dewan Komisaris minimum ditempati oleh PT. Tempo Scan Pacific, Tbk sebesar 33,33% pada tahun 2011 sedangkan nilai maksimum sebesar 66,67% ditempati oleh PT. Kalbe Farma, Tbk pada tahun 2012.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 4,09% dengan penyebaran berkisar 0,71%. Nilai Jumlah Rapat Dewan Komisaris minimum ditempati oleh PT. Pyridam Farma, Tbk sebanyak 3 kali pada tahun 2011 sedangkan nilai maksimum sebanyak 6 kali ditempati oleh PT. Kimia Farma, Tbk pada tahun 2015.

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data penelitian untuk dapat dilanjutkan ke tahap analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan alat uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, diketahui seluruh variabel yang diteliti bersifat normal karena nilai *Asym.Sig. (2-tailed)* sebesar $0.669 > \alpha$ (0.05), sehingga dapat dinyatakan data pada model penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan alat uji *corellation matrix*, diketahui nilai *variance inflation factors* (VIF) pada variabel Ukuran Komite Audit sebesar 5.500, variabel *Independensi* Komite Audit sebesar 5.981, variabel Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit sebesar 1.411, variabel Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 1.142, variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar 2.432, variabel *Independensi* Dewan Komisaris sebesar 2.219, variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris sebesar 1.311, variabel Kepemilikan Institusi sebesar 1.732 dan variabel Ukuran Perusahaan sebesar 1.781. Jika nilai VIF tiap variabel berada diantara nilai 1 – 10, maka model penelitian dinyatakan terhindar atau bebas dari gejala multikolinieritas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan alat uji park, diketahui nilai signifikansi variabel Ukuran Komite Audit sebesar 0.599, variabel *Independensi* Komite Audit sebesar 0.273, variabel Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit sebesar 0.775, variabel Jumlah Rapat Komite Audit sebesar 0.619, variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar 0.743, variabel *Independensi* Dewan Komisaris sebesar 0.766, variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris sebesar 0.320, variabel Kepemilikan Institusi sebesar 0.789 dan variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0.619. Jika setiap variabel bebas memperoleh nilai signifikansi $\geq \alpha$ (0.05) maka dapat dinyatakan data pada model penelitian bebas gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan alat uji *durbin watson*, diketahui nilai *Durbin Watson* (DW) terletak diantara kategori penilaian “ $dL < DW < dU$ ” atau $1,337 (dL) < 1,656 (DW) < 1,995 (dU)$, sehingga disimpulkan “tidak ada kesimpulan” pada data dalam model penelitian.

Uji kebaikan model (*goodness of fit*) merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya. Indikator *goodness of fit* meliputi uji model *fit* atau uji signifikansi simultan dan uji koefisien determinasi.

Hasil uji model fit dengan menggunakan uji simultan, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 8,238 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai F_{hitung} (8,238) > F_{tabel} sebesar 2,080 dan nilai signifikansi (0,000) < α (0,05), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh dari Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusi dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal Intelektual secara simultan. Hasil ini menunjukkan model penelitian lulus persyaratan uji *goodness of fit* karena seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tetap secara simultan.

Hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwasanya variasi pada variabel Pengungkapan Modal Intelektual dapat dijelaskan sebesar 46,2% oleh variabel Ukuran Komite Audit, *Independensi* Komite Audit, Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, *Independensi* Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusi dan Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,049	0,922		-2,221	0,030
Ukuran KA (X1)	1,463	0,319	0,905	4,585	0,000
<i>Independensi</i> KA (X2)	0,032	0,009	0,741	3,600	0,001
Jml. Ahli Keuangan KA (X3)	0,008	0,003	0,250	2,501	0,015
Jml. Rapat KA (X4)	-0,418	0,221	-0,171	-1,897	0,062
Ukuran DK (X5)	0,083	0,040	0,271	2,067	0,043
<i>Independensi</i> DK (X6)	0,030	0,007	0,554	4,417	0,000
Jml. Rapat DK (X7)	-0,245	0,073	-0,321	-3,333	0,001
Kep. Institusi (X8)	-0,010	0,005	-0,235	-2,126	0,037
Ukuran Perusahaan (VC)	0,057	0,022	0,295	2,630	0,011

a. Dependent Variable: Pengungkapan Modal Intelektual (Y)

Sumber: Hasil olah data SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel 5, maka persamaan regresi linear sederhana pada model 1 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{ICDI} &= -2,049 + 1,463 \text{ Uk.KA} + 0,032 \text{ ID.KA} + 0,008 \text{ Ak.KA} - 0,418 \text{ Rpt.KA} \\ &+ 0,083 \text{ Uk.DK} + 0,030 \text{ Id.DK} - 0,245 \text{ Rpt.DK} - 0,010 \text{ Kep.Inst} + 0,057 \text{ Size} \\ &+ 0,397 e \end{aligned}$$

Pengujian hipotesis menggunakan uji t (uji parsial). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tetapnya secara individu. Hipotesis penelitian yang akan diuji terdiri dari hipotesis pertama (H_1), hipotesis kedua (H_2), hipotesis ketiga (H_3), hipotesis keempat (H_4), hipotesis kelima (H_5), hipotesis keenam (H_6), hipotesis ketujuh (H_7) dan hipotesis kedelapan (H_8) yang dijelaskan berikut ini.

a. Uji Hipotesis Pertama (H_1)

Diketahui nilai signifikansi (0,000) \leq 0,05, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Nilai koefisien regresi variabel ukuran komite audit menunjukkan tanda positif, maka dapat disimpulkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis pertama (H_1) terbukti diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Ishak (2018), Wahyuni (2016) dan Haji (2015) yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Perusahaan yang memiliki jumlah ukuran

komite audit yang lebih besar atau lebih banyak dapat menyebabkan peningkatan perusahaan untuk mengungkapkan atau menyediakan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan yang diantaranya berupa pengungkapan modal intelektual

b. Uji Hipotesis Kedua (H₂)

Diketahui nilai signifikansi $(0,001) \leq 0.05$, maka H₀₂ ditolak dan H_{a2} diterima. Nilai koefisien regresi variabel *independensi* komite audit menunjukkan tanda positif, maka dapat disimpulkan *independensi* komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis kedua (H₂) terbukti diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Perusahaan yang memiliki persentase komite audit independen yang lebih besar maka akan menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan yang diantaranya berupa pengungkapan modal intelektual.

c. Uji Hipotesis Ketiga (H₃)

Diketahui nilai signifikansi $(0,015) \leq 0.05$, maka H₀₃ ditolak dan H_{a3} diterima. Nilai koefisien regresi variabel jumlah ahli keuangan komite audit menunjukkan tanda positif, maka dapat disimpulkan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis ketiga (H₃) terbukti diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Ishak (2018) dan Haji (2015) menyatakan jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Anggota Komite audit yang memiliki pengetahuan atau kemampuan mengelolah (memahami dan mempraktekan) tentang masalah keuangan, mencapai tanggung jawab secara efisien, mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dan kehandalan data dan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan serta meningkatkan kuantitas informasi keuangan sebagai bagian dari item pengungkapan modal intelektual perusahaan

d. Uji Hipotesis Keempat (H₄)

Diketahui nilai signifikansi $(0,062) \geq 0.05$, maka H₀₄ diterima dan H_{a4} ditolak. Maka dapat disimpulkan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis keempat (H₄) terbukti ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Mahadewi (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada komite audit sebagai upaya mengoptimalisasi pengungkapan modal intelektual perusahaan.

e. Uji Hipotesis Kelima (H₅)

Diketahui nilai signifikansi $(0,043) \leq 0.05$, maka H₀₅ ditolak dan H_{a5} diterima. Nilai koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan tanda positif, maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis kelima (H₅) terbukti diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Ishak (2018), Wahyuni (2016), menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Pengendalian dan monitoring dewan komisaris dilakukan melalui komite-komite yang membantunya mengawasi secara langsung aktivitas perusahaan. Dikaitkan dengan pengungkapan mengenai nilai perusahaan (*Intellectual Capital/IC*), tekanan dewan komisaris yang berukuran besar terhadap manajemen akan semakin meningkat untuk mengungkapkan nilai perusahaan melalui pengungkapan modal intelektual.

f. Uji Hipotesis Keenam (H₆)

Diketahui nilai signifikansi $(0,000) \leq 0.05$, maka H₀₆ ditolak dan H_{a6} diterima. Nilai koefisien regresi variabel *independensi* dewan komisaris menunjukkan tanda positif, maka dapat disimpulkan *independensi* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Maka hipotesis keenam (H₆) terbukti diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan

penelitian dari Ishak (2018) menyatakan *independensi* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Dewan komisaris yang proporsi komisaris *independen* yang lebih tinggi akan memiliki kontrol kuat atas keputusan manajerial, karena komisaris independen memiliki insentif untuk melakukan pengendalian atas keputusan mereka guna tetap mempertahankan citra yang baik bagi sumber modal dari luar perusahaan yang dapat distimulasi melalui pengungkapan modal intelektual.

g. Uji Hipotesis Ketujuh (H7)

Diketahui nilai signifikansi $(0,001) \leq 0.05$, maka $H0_7$ ditolak dan Ha_7 diterima. Nilai koefisien regresi variabel jumlah rapat komisaris menunjukkan tanda negatif, maka dapat disimpulkan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Mengingat adanya perbedaan tanda pengaruh yang terdapat dalam hipotesis yang diajukan, yakni jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan hasil faktual pengujian hipotesis menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual, maka hipotesis ketujuh (H7) terbukti ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Indah (2017) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Adanya dominasi suara dari anggota Dewan Komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan atau kurang mengutamakan pengungkapan modal intelektual untuk bisa sebanyak mungkin diinformasikan dalam laporan tahunan perusahaan.

h. Uji Hipotesis Kedelapan (H8)

Diketahui nilai signifikansi $(0,037) \leq 0.05$, maka $H0_8$ ditolak dan Ha_8 diterima. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusi menunjukkan tanda negatif, maka dapat disimpulkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Mengingat adanya perbedaan tanda pengaruh yang terdapat dalam hipotesis yang diajukan, yakni kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan hasil faktual pengujian hipotesis menyatakan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual, maka hipotesis kedelapan (H8) terbukti ditolak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dari Ishak (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Kepemilikan institusi yang lebih sedikit maka akan mengurangi kontribusi perusahaan terkait dalam pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, khususnya memperbanyak informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan modal intelektual.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. *Independensi* komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Jumlah ahli keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. *Independensi* dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan farmasi.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagi investor yang memiliki minat berinvestasi saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI sebaiknya memperhatikan efektivitas komite audit dan dewan direksi sebagai pertimbangan utama, mengingat variabel tersebut telah terbukti secara empiris dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti perusahaan sektor lainnya seperti sektor perbankan, sektor properti dan sektor lainnya, sektor manufaktur karena pada perusahaan dalam sektor tersebut keberadaan pengungkapan modal

intelektual yang dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, dapat melakukan penambahan variabel lain, seperti nilai perusahaan untuk mendapatkan hasil yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abawayya, S. and Guthrie, J. 2010. *Intellectual Capital and The Capital Market: a Review and Synthesis. Journal of Human Resource Costing & Accounting*. Vol. 14 No. 3. pp.196–226
- Abeysekera, I. 2009. *The Influence Of Board Size On Intellectual Capital Disclosure By Kenyan Listed Firms. Journal of Intellectual Capital*. Volume 11 No. 4. pp. 504–18
- Aini, Sarifah. 2017. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Arifah, Dista Amalia 2012. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital* Pada Perusahaan *IC Intensive*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.9 No. 2.
- Belkaoui, A. R. (2003). *Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms. Journal of Intellectual Capital*. Vol. 4. No. 2. pp: 215-226.
- Bontis, N. 2005. *Intellectual Capital: An Explanatory Study That Develops Measures And Models. Management Decision*. Vol. 36. No. 2. pp: 63-76
- Brigham, Eugene F. dan J.F. Houston. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Bruggen, A., Vergauwen, P., & Dao, M. 2009. *Determinants of Intellectual Capital Disclosure: Evidence from Australia. Management Decision*, Vol. 47. No. 2. Pp: 233-245.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haji, Abdifatah Ahmed. 2015. *The Role of Audit Committee Attributes in Intellectual Capital Disclosure: Eviden from Malaysia. Emerald Insight. Managerial Auditing Journal* Vol.30 No. 8.
- Holland, J. 2006. *Fund Management, Intellectual Capital, Intangibles and Private Disclosure. Managerial Finance*. Vol. 32. No. 4. pp: 277–316
- Indah, Nurdiana 2017. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Intellectual Capital Disclosure*, *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6 No.3
- Ishak, Zuaini. 2018. *Monitoring Mechanism and Intellectual Capital Disclosure Among Bank in the GCC. Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol.22 No.1.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 29/PM/2004 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Li, J., Pike, R. & Haniffa, R. (2008). *Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms. Accounting and Business Research*, Vol. 38 No. 2. 137-159.
- Mahadewi, Anak Agung Mas 2013. Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Pada Pengungkapan Modal Intelektual Perusahaan Yang Go Public di BEI, *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi* 2.
- Nisfiannoor, 2010. *Desain Proposal Penelitian*. Yogyakarta. Andi Offset.

- Nurziah, Fatwa 2014. Analisis Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi Terhadap *Intelectual Capital Disclosure*, *Fiance and Banking Journal*. Vol.16 No. 2.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX. 1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Santoso. Singgih, 2010. *Buku Latihan SPSS*. Jakarta. Elex Media Computindo.
- Sartika, Dewi. 2015. *Moderasi Kepemilikan Institusional Terhadap Hubungan Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan*. Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi. Vol. 4 Nomor 12.
- Sartono, Agus. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. BPFE.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- . 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Research Design*. Bandung. Alfabeta.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Utomo, Hadi dan Melyana Putri. 2015. *Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasi.
- Wahyuni. Made Arie, 2016. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Pada Pengungkapan Modal Intelektual, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Volume. 21 No. 1.
- Xie, B., Davidson, W.N. & Dadalt, P.J. 2003. *Earnings Management And Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee*. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 9 No. 3. pp. 295-316.